



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 Agustus 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian Penggunaan (Refocussing) Kebijakan APBN Tahun 2021; 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas “**Penyesuaian penggunaan (*Refocusing*) Kebijakan APBN Tahun 2021, Isu-isu Aktual dan Alternatif Solusinya**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai *refocusing* dan realokasi Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar Rp1.668.783.366.000,- (*Satu Triliun Enam Ratus Senam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Dalam ribuan (000,-)

SATKER	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TOTAL
Setjen	200.000.000	6.565.419	777.686.056	140.776.214	1.125.027.689
Itjen	-	-	6.150.000	-	6.150.000.000
Dayasos	15.000.000	1.070.000	77.131.200	-	93.201.200
Rehsos	79.594.502	17.095.475	94.555.600	-	191.245.577
Linjamsos	60.000.000	1.728.328	35.130.572	-	96.858.900
PFM	5.000.000	1.200.000	42.600.000	-	48.800.000
Badiklit	15.000.000	4.000.000	81.547.765	6.952.235	107.500.000
TOTAL	374.594.502	31.659.222	1.114.801.193	147.728.449	1.668.783.366

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai penambahan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk:

- a. Penambahan anggaran BA BUN I untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan (Mei – Juni 2021) untuk 10juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) @Rp300.000,-/bulan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) dan biaya penyaluran melalui PT. Pos sebesar Rp138.500.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*); masih ada sisa bantuan yang belum terealisasi sebesar Rp3.822.187.325.000,- (*Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga diperlukan penambahan

- sebesar Rp2.316.312.675.000,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- b. Penambahan anggaran BA BUN II sebesar Rp13.397.297.200.000,- (*Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) untuk:
 - i. Sisa bantuan sosial yang belum terealisasi sebesar Rp1.202.702.800.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dalam rangka penambahan alokasi Kartu Sembako selama 2 bulan (Juli – Agustus 2021) bagi 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) @Rp200.000,-/bulan sebesar Rp7.520.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah*) oleh karena itu diperlukan penambahan Rp6.317.297.200.000,- (*Enam Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - ii. Kartu Sembako usulan Pemda bagi 5,9 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 6 bulan (Juli – Desember 2021) @Rp200.000,-/bulan sebesar Rp7.080.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI menolak adanya rencana *refocusing* lanjutan yang akan berdampak pada pengurangan anggaran dan target pencapaian program dan kegiatan Kementerian Sosial Tahun 2021.
 4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meminta alokasi anggaran dan sasaran untuk perlindungan sosial bagi seluruh anak yatim piatu termasuk akibat pandemi Covid-19.
 - b. Melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses pendataan dukungan anggaran untuk perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.
 - c. Memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2021.

- d. Memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merespon perubahan iklim, potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, S.Pt